

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL  
NEGARA TERHADAP TENAGA HONORER PADA  
PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH:****M. RIDHO ZULFAHMI****NIM : 11675101140****PROGRAM S.1****JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****PEKANBARU****2020**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. Ridho Zulfahmi  
 Nim : 11675101140  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Disetujui oleh,


Dosen Pembimbing

  
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si  
 NIK. 130 712 075


Mengetahui,

Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



  
Dr. Drs. H. Muh. Skid HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan  
 Administrasi Negara

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : M. Ridho Zulfahmi  
 Nim : 11675101140  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor  
 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap  
 Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Bengkalis  
 Tanggal Ujian : 20 Juli 2020

Disetujui oleh,


Ketua Penguji

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I

  
Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
 NIP. 19640508 199303 2 002

Penguji II

  
M. Rafi, S.Sos, M.Si  
 NIK. 130 717 059

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**

**Oleh: M. Ridho Zulfahmi**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dampak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis dan untuk mengetahui apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai dengan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan dampak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Informen penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya melalui terbentuknya legalitas formalnya seperti diterbitkannya surat keputusan (SK) tenaga honorer yang awalnya dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Daerah, untuk tahun 2019 seterusnya surat keputusan (SK) sudah dialihkan kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik itu Kepala Badan dan Kepala Dinas dilingkungan instansi, selain itu Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan roda pemerintahan (kinerja) masih membutuhkan tenaga honorer seperti tenaga operator, keamanan dan kebersihan yang sifatnya untuk membantu kelancaran perencanaan pekerjaan.*

**Kata Kunci: Jenis, Status, Kedudukan, Hak dan Kewajiban**

UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wata'ala yang mana berkat rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad shallahu alaihiwasalam yang menjadi suritauladan bagi seluruh umat Islam. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah subhanahu wata'ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Kepada kedua Orang Tua, Ayahanda Mahmud dan Ibunda Siti Marso'ah yang senantiasa membimbing, memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial semoga menjadi Fakultas teladan dan terbaik di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, SH.i, MA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Administrasi Negara UIN SUSKA RIAU.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.Kp selaku pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat dan nasehat yang luar biasa kepada penulis.

Bapak Muammar Alkadafi S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.

9. Bapak/Ibu Staf Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.

10. Untuk keluarga H. Amri, Sangiatun, Samrotu, Siti Mahmudah, dan Adik Ulfa Mumtazah yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang luar biasa sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan kuliah.

11. Untuk sahabat Fata Jihadul Mahmud, M. Qauliyan As-Syauqi, Mhd. Firdaus Masud, Ahmad Hady Kusmana dan Khotibul Umam.

12. Untuk teman-teman Administrasi Negara Kelas D Angkatan 2016 yang sudah berjuang bersama –sama dari awal semester hingga akhir dan untuk teman –teman KKN Kecamatan Bantan, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang menyelesaikan tugas dunia ini semoga tetap menjadi keluarga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

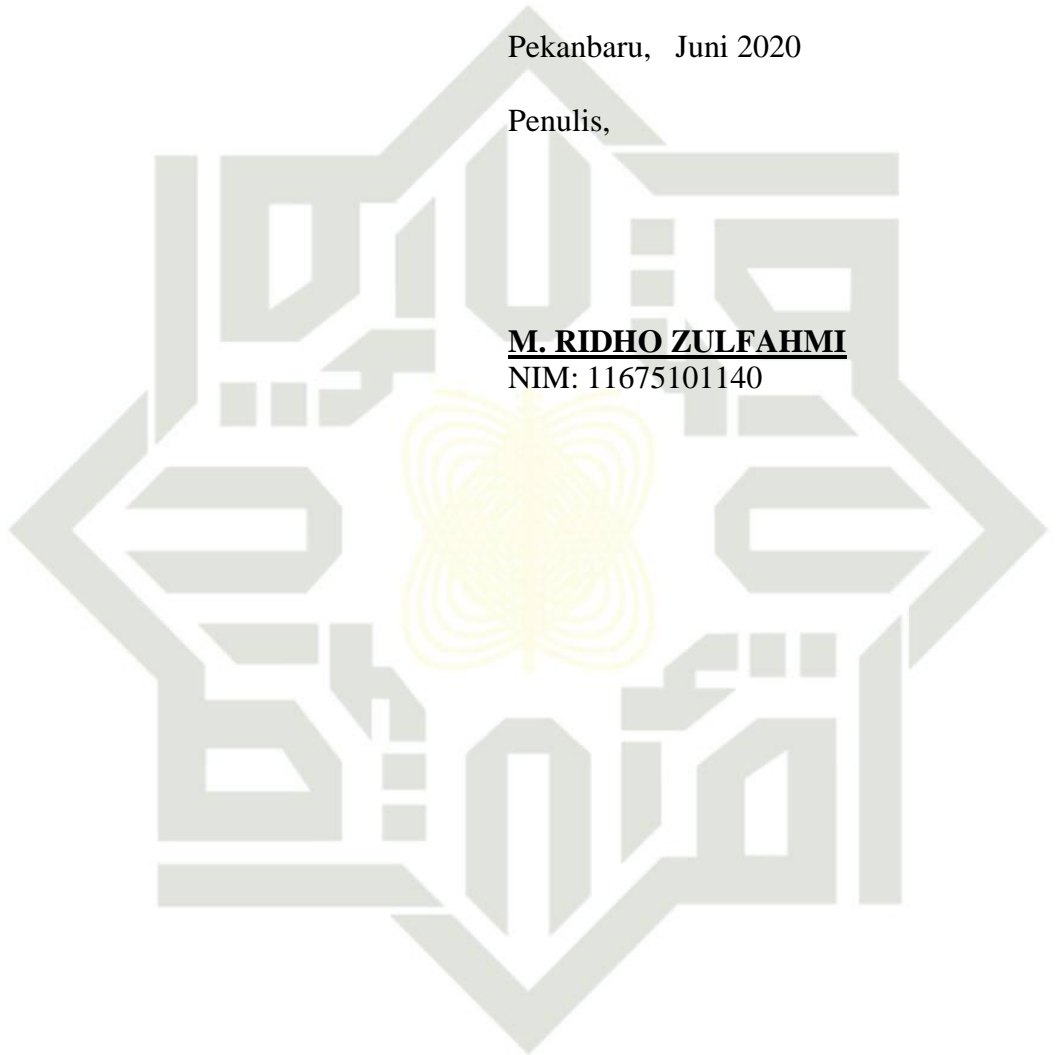
kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

**M. RIDHO ZULFAHMI**

NIM: 11675101140



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Fokus Penelitian .....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian Administrasi Kepegawaian .....	9
2.2 Tujuan Administrasi Kepegawaian .....	11
2.3 Fungsi Administrasi Kepegawaian .....	12
2.4 Pengertian Aparatur Sipil Negara .....	14
2.5 Jenis, Status Dan Kedudukan .....	15
2.6 Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorar .....	20
2.7 Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Islam.....	23
2.8 Penelitian Terdahulu .....	25
2.9 Kerangka Pemikiran.....	27
2.10 Konsep Operasional .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
3.2 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Sumber Data.....	29



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5	Informen Penelitian .....	31
3.6	Analisis Data .....	32

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	33
4.2	Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis .....	34
4.3	Profil Kepegawaian .....	35
4.4	Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis...	35
4.5	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis .....	36
4.6	Jenis Populasi Setiap Bidang .....	41
4.7	Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis .....	42

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1	Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis .....	45
5.1.1	Jenis .....	47
5.1.2	Status .....	49
5.1.3	Kedudukan .....	51
5.1.4	Hak dan Kewajiban .....	54
5.1.5	Upaya Pemerintah atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Terhadap Tenaga Honorer .....	58
5.1.6	Jumlah Tenaga Honorer Kategori Satu (K1) Dan Kategori Dua (K2) di Kabupaten Bengkalis .....	63
5.1.7	Sistem atau Penggajian Tenaga Honorer .....	64
5.1.8	Status Tenaga Honorer .....	64
5.1.9	Pengangkatan Tenaga Honorer .....	66
5.1.10	Kedudukan Tenaga Honorer .....	68



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.....	70
5.3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	72
5.3.1	Proses Pengangkatan Tenaga Honorer oleh Pemda .....	76

## BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan .....	84
6.1.1	Upaya atau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam Menata Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer Dan Sejenisnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara .....	84
6.1.2	Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer Dan Sejenisnya Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis .....	85
6.2	Saran.....	85

## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah pegawai dan honorer pada kantor sekretariat daerah kabupaten bengkalis tahun 2019 .....	5
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai PNS dan Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikannya .....	5
Tabel 2.1.	Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel 2.2.	Konsep Operasional .....	28
Tabel 3.1	Informen Penelitian .....	31
Tabel 4.1	Populasi dan Sampel .....	41
Tabel 4.2	Jumlah PNS dan Honorer Pada Satuan Perangkat Daerah.....	43
Tabel 5.1	Hak yang di Terima.....	63
Tabel 5.2	Jumlah Honorer yang Lulus CPNS dan Tidak Lulus CPNS.....	64
Tabel 5.3	Pendapatan atau Gaji Tenaga Honorer.....	64
Tabel 5.4	Jumlah Pegawai PNS dan Honorer .....	76
Tabel 5.5	Perbandingan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terhadap Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	78



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan pegawai tidak tetap selama ini memang menjadi polemik masalah kepegawaian di Indonesia. Kedudukannya yang dilematis dan ambigu antara dibutuhkan maupun tidak diperlukan. Mengenai status dan posisi pegawai tidak tetap dalam konstelasi pendayagunaan aparatur negara sangatlah dinamis, semenjak disahkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 ini. Dikatakan sangatlah dinamis, karena terdapat berbagai perubahan yang signifikan dalam memilih posisi pegawai tidak tetap dalam manajemen kepegawaian negara kontemporer. (Wisisto Raharjo Jati, 2015;101) Adapun berbagai macam perubahan tersebut meliputi adanya aspek pemberian tugas pokok fungsi, relasi kedudukannya dengan pegawai negeri sipil, mekanisme pengangkatan, maupun tunjangan kesejahteraan yang selama ini menjadi krusial dalam membicarakan pegawai tidak tetap ini.

Untuk membentuk Aparatur Sipil Negara yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia, maka perlu mengganti undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan undang-undang nomor 43 tahun 1999 pun diganti dengan undang-undang baru nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara karena undang-undang nomor 43 tahun 1999

sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Perubahan atas UU No. 43 tahun 1999 dengan UU No. 5 tahun 2014 menciptakan kondisi transisi terhadap kedudukan lembaga kepegawaian di Indonesia. (Eni Suharti,2016;2)

Kekuasaan ini disalahgunakan oleh penguasa orde baru untuk menguasai struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep monoloyalitas. Kosep seperti ini yang akan menjadi dampak permasalahan dengan penataan kepegawaian dimana sejak berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang di singkat sebagai ASN.

Keberadaan tenaga honorer dalam perkembangannya dilingkungan instansi pemerintah bertujuan untuk membantu kinerja PNS yang mana PNS tersebut sudah kewalahan dalam menjalankan fungsi dari pemerintah daerah yaitu salah satunya dalam hal pelayanan publik yang merupakan fungsi dari Pemerintah Daerah itu sendiri (Putri Aldila & I Kutut Suardita;2). Tenaga honorer memegang peranan penting demi terselenggaranya pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat, sebab pelayanan publik sangat berhubungan langsung dengan masyarakat itu sendiri sehingga proses pelayanan publik harus bisa memuaskan masyarakat itu sendiri.

Tenaga honorer itu sendiri memiliki pengertian yaitu seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer ini kemudian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dibedakan menjadi 2 yaitu tenaga honorer kategori K1 dan tenaga honorer kategori K2.

Alasan diberlakukannya tenaga honorer itu sendiri lebih kepada karena perekrutannya bisa dilakukan secara kecil-kecilan atau massif. Hal ini juga didasari banyaknya instansi-instansi pemerintah yang membutuhkan tambahan pegawai sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik terutama di daerah-daerah dalam jumlah kadang-kadang besar juga. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi: Disamping pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini dapat dikategorikan sebagai tenaga honorer dan tenaga kontrak.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara keberadaan tenaga honorer ini kemudian di hapus. Istilah tenaga honorer tidak ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 ini dan digantikan dengan pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK). Tetapi tenaga honorer tidak bisa menjadi pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak harus ada seleksi dan test sehingga pemerintah daerah tidak bisa sembarangan menjanging pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak dan harus sesuai dengan kebutuhan mengingat pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak mempunyai hak yang sama dengan PNS yaitu berupa jaminan kesehatan dan lain-lain sesuai dengan aturan ketenagakerjaan. (Dicky Agus Saputro, prof. Sudarsono, Lufi effendi;5)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena yang terjadi setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis, dengan diberlakukannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 maka pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak maka mau tidak mau pemerintah daerah harus menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014. Karena, didalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara hak tenaga honorer untuk mendapatkan gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi itu tidak ada di jelaskan. Tetapi hal itu tidak menciptakan sebuah keadilan bagi tenaga honorer apalagi tenaga honorer yang telah bekerja selama puluhan tahun berharap suatu saat dapat diangkat menjadi calon PNS tiba-tiba dengan berlakunya aturan baru maka mereka di hapuskan.

Dengan demikian tindakan pemerintah daerah untuk pemberlakuan PPPK mau tidak mau eksistensi terhadap tenaga honorer akan hilang, sehingga pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih memperhatikan keberadaan tenaga honorer yang sekarang dan kejelasan status tenaga honorer perlu untuk diberi keadilan agar tidak terjadi yang diinginkan dan menimbulkan permasalahan kedepannya.

Berikut ini tabel jumlah pegawai pada kantor sekretariat daerah kabupaten bengkalis :

**Tabel 1.1 Jumlah pegawai dan honorer pada kantor sekretariat daerah kabupaten bengkalis tahun 2019**

No	Pegawai	Jumlah Pegawai
1.	PNS	180
2.	HONORER	230

**Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut maka dapat dilihat bahwa jumlah pegawai ternyata lebih banyak pegawai honorer ketimbang pegawai negeri sipil, didalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara istilah tenaga honorer ini tidak ada lagi dalam undang-undang ini dan status tenaga honorer digantikan dengan pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK) dalam pasal 22 PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

**Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS dan Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Jenjang Pendidikannya**

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2019
1.	Pasca Sarjana	14
2.	Sarjana	75
3.	Diploma (D3)	9
4.	SMA	82
Jumlah PNS		180

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2019
1.	Pasca Sarjana	-
2.	Sarjana	45
3.	Diploma (D3)	20
4.	SMA	165
Jumlah Honorer		230

**Sumber : Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut maka dapat dilihat bahwa pegawai pada pemerintahan sekretariat daerah kabupaten bengkalis ada yang tingkat pendidikannya tamatan SMA, Diploma (D3), Sarjana, dan Pasca Sarjana. Dari

tabel diatas dapat dilihat bahwa pendidikan pada pegawai pemerintahan sekretariat daerah kabupaten bengkalis masih sangat rendah sehingga keinginan pegawai honorer untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil tidak tercapai setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA HONORER PADA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dalam uraian pada latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana dampak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis?
2. Apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja upaya atau kebijakan pemerintah kabupaten bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

### **Manfaat Penelitian**

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian analisis dampak pemberlakuan undang-undang No.5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

### **Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang ada maka dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar peneliti lebih terarah dan terfokus bagaimana dampak pemberlakuan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya pada pemerintah daerah kabupaten bengkalis dan apa saja upaya pemerintah kabupaten

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bengkalis dalam menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang konsep, konsep operasional/variable penelitian, hipotesis, dan kerangka pemikiran.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis sumber data, populasi, dan sample teknik pengumpulan data, serta analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mengumpulkan tentang sejarah singkat, visi dan misi, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

### BAB VI : PENUTUP

Bab ini mencoba mengambil beberapa kesimpulan dan dilanjutkan dengan memberikan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Administrasi Kepegawaian

Menurut Drs. Miftah Thoha (1987;16-18) Administrasi kepegawaian atau sering disebut manajemen kepegawaian tidak asing lagi bagi kegiatan administrasi instansi pemerintah. Istilah ini merupakan suatu peristilahan yang terancang secara umum yang dapat diperbandingkan dengan istilah-istilah manajemen tenaga kerja (*man power or human resc*). Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Bahkan administrasi kepegawaian ini merupakan salah satu unsur dari administrasi tersebut. Sebagai salah satu unsur sifat administrasi kepegawaian masih tetap administrasi hanya saja sasaran dari kegiatannya ialah tenaga kerja manusia. Lingkup administrasi kepegawaian ini antara lain, penerimaan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian tenaga kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian sasaran dan lingkup kegiatan administrasi kepegawaian adalah pegawai itu sendiri dengan dimulai dari saat penerimaan sampai dengan pemberhentiannya.

Konsep administrasi kepegawaian atau *personnel administration* di Amerika Serikat dipergunakan dalam bidang pemerintah, sedangkan *personnel management* diterapkan dalam bidang bisnis. Di Indonesia ada kecenderungan menggunakan manajemen kepegawaian (*personnel management*) di bandingkan pemerintahan ataupun di bidang bisnis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut M. Manullang (1998;15) administrasin kepegawaian adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memberikan kepuasan kepada para pekerja.

Menurut Burhannudin A. Tayibnapis (1994;15) administrasi kepegawaian sebagai upaya memperoleh pegawai negeri sipil yang loyal kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945, cakap, terampil, jujur, dan disiplin dalam melaksanakan pokok pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan menurut Arifin Abdurrachman (1989;16) mengatakan bahwa administrasi kepegawaian adalah salah satu cabang dari administrasi negara yang berkaitan dengan para pegawai negara.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni mempelajari proses penggunaan tenaga manusia mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Selain itu, administrasi kepegawaian negara adalah proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan.

Secara fungsional, administrasi kepegawaian negara adalah mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja manusia sebagai usaha kerja sama dalam merumuskan tujuan, sasaran pokok kebijakan politik, dan menyusun organisasi untuk menyelenggarakan pelaksanaan tujuan sasaran pokok atau kebijaksanaan politik itu.(Rusdi & Muammar Alkadafi;2018;14)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Tujuan Administrasi Kepegawaian

Menurut Pigors dan Myers dalam buku Dr. Sahya Anggara yang berjudul Administrasi Kepegawaian (2016;16-17), tujuan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Effective utilization of human resources, yaitu memanfaatkan tenaga manusia secara efektif. Sumber daya manusia dapat memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan. Semua tenaga kerja dalam organisasi dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Administrasi kepegawaian berarti mengelola profesionalitas para pegawai sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan kebutuhan organisasi. Demikian pula, tenaga kerja yang tidak sesuai kebutuhan organisasi harus dilatih agar memiliki keahlian yang berdayaguna dan berhasil guna sehingga langkah awal dari proses administrasi kepegawaian adalah pengadaan (recruitment) tenaga kerja. Dalam proses pengadaan tenaga kerja diperlukan analisis kebutuhan menyangkut semua fungsi dan tugas yang ada. Dengan demikian, organisasi membutuhkan pengisian tenaga untuk setiap fungsi dan tugas tersebut. Jika pengadaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada, demikian pula tenaga kerja yang direkrut itu sesuai dengan persyaratan yang dikemukakan sehingga efektivitas tenaga kerja dalam organisasi akan diperoleh.
2. Desirable working relationship among all member of the organization, yaitu membangun sistem yang integral, artinya setiap subsistem saling berhubungan dan melaksanakan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah direncanakan. Hubungan kerja antara pegawai, antara atasan dan bawahan, atasan dan koleganya, dan bawahan dan bawahan menentukan keberhasilan penugasan. Hubungan kerja yang diharapkan adalah hubungan kerja yang harmonis lahir dan batin sehingga para pegawai menikmati pekerjaannya masing-masing.

3. Maximum individual development yaitu mengembangkan kecakapan individu semaksimal mungkin.

#### Fungsi Administrasi Kepegawaian

Menurut Felix A. Nigro dalam bukunya Rusdi & Muammar Alkadafi yang berjudul Administrasi Kepegawaian Aparatur Negara (2018:22-23) fungsi administrasi kepegawaian negara adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian sehingga tugas dan tanggung jawab setiap pegawai ditentukan dengan tugas dan jelas.
2. Klasifikasi jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan saingan dari sektor swasta.
3. Penarikan tenaga kerja yang baik.
4. Seleksi pegawai yang menjamin pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan yang sesuai.
5. Perencanaan pelatihan jabatan yang luas dengan tujuan menambah keterampilan pegawai, meningkatkan semangat kerja, dan mempersiapkan kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penilaian kecakapan pegawai secara berkala dengan tujuan meningkatkan hasil kerja dan menentukan pegawai-pegawai yang cakap.
7. Pencanaan kenaikan jabatan yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan dengan cara menepatkan pegawai-pegawai yang cakap ditempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kecakapannya sehingga mereka dapat mencapai tingkat jabatan yang setinggi-tingginya.
8. Kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia.
9. Kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan semangat kerja dan disiplin pegawai.

Pada saat ini, pengelolaan pegawai dalam organisasi telah bergeser dari pendekatan administrasi kepegawaian menjadi manajemen sumber daya manusia.

Secara ringkas manajemen sumber daya manusia adalah proses pengadaan sumber daya paling penting bagi suatu organisasi, yaitu sumber daya manusia, yang mencakup pengadaan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya, mengembangkan kapasitasnya, memanfaatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan sumberdaya terbaik dengan menerapkan sistem kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan kinerjanya dalam organisasi, serta menjamin loyalitas kepada organisasi melalui penyediaan jaminan kesejahteraan yang memadai pada saat aktif maupun setelah pensiun.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1 Pengertian Aparatur Sipil Negara

Subjek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian adalah pegawai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 5 tahun 2014, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara menurut undang-undang nomor 5 tahun 2014 dalam bukunya Sri Hartini & Tedi Sudrajat yang berjudul hukum kepegawaian di indonesia (2017;32-33) adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi ASN terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar.
2. Kode etik dan ode perilaku.
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab.
4. Pada pelayanan publik.
5. Kompetensi.
6. Kualifikasi akademik.
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
8. Profesionalitas jabatan.ian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencermati keberadaan dari subjek kepegawaian, maka pegawai aparatur sipil negara merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam UU No. 5 tahun 2014 untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja dalam instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

Selanjutnya yang di maksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan yang di maksud dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

### 2.5 Jenis, Status dan Kedudukan

Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Sedangkan PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor pegawai secara nasional. Sedangkan status PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Sedangkan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Adapun hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Hak Pegawai ASN

Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan akuntabel, maka setiap Pegawai Negeri Sipil diberikan hak sebagai berikut:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan dan
- e. Pengembangan kompetensi

Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, adapun didalam buku Rusdi & Muammar Alkadafi yang berjudul administrasi kepegawian aparatur sipil negara (2018:42-28) berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi berdasarkan Pasal 92 UU ASN pemerintah juga memberikan perlindungan berupa:

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan kematian dan
- d. Bantuan hukum

Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berhak memperoleh:

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Cuti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perlindungan dan
- d. Pengembangan kompetensi.

Adapun yang dimaksud dengan “gaji” adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan badan kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas. Tunjangan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian kinerja. Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.

Menurut undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa di samping pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Hal inilah yang menjadi dasar untuk diangkatnya tenaga honorer untuk bekerja di instansi pemerintah.

Namun sejak keluarnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 terdapat penjelasan mengenai tenaga honorer dan ini pula yang menjadi implikasi banyaknya minat menjadi tenaga honorer. Adapun penjelasan tentang pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yaitu Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dengan alasan untuk lebih memprioritaskan tenaga honorer menjadi CPNS. Hal ini berlanjut dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 yang berisi perubahan pertama dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012.

Dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tenaga honorer dibagi menjadi honorer kategori 1, honorer kategori 2 dan jabatan mendesak untuk menjadi CPNS.

Berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi hilang. Hal ini terjadi dikarenakan ketentuan dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 mendefinisikan istilah pegawai pemerintah dengan penggunaan kerja (PPPK). Sehingga secara otomatis kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan digantikan oleh PPPK.

Walaupun PPPK dengan tenaga honorer secara kedudukan hampir sama akan tetapi secara otomatis tenaga honorer dapat langsung menjadi PPPK. Hal ini dikarenakan PPPK berada dengan tenaga honorer sebab PPPK itu sendiri memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas sehingga hal ini membedakan dengan tenaga honorer. Kemudian hal yang paling membedakan adalah PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi calon pegawai negeri sipil, ini berbeda dengan tenaga honorer yang dapat diangkat secara otomatis setelah keluarnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dengan masa kerja minimal satu tahun. Hal ini juga dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk menaikkan integritas dan profesionalisme di dalam tubuh kepegawian Indonesia. Sehingga tenaga honorer yang ingin menjadi PPPK harus memenuhi syarat administratif dan harus melaksanakan beberapa tes.

Terkait dengan Manajemen PPPK itu sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 94 yang terdiri atas:

- a. Penetapan kebutuhan
- b. Pengadaan
- c. Penilaian kinerja
- d. Penggajian dan tunjangan
- e. Pengembangan kompetensi
- f. Pemberian penghargaan
- g. Disiplin
- h. Pemutusan hubungan kerja
- i. Perlindungan.

Terkait dengan jabatan yang diisi oleh PPPK, hal itu diatur dengan peraturan presiden dan setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja seperti tertuang pada pasal 94 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terkait dengan penggajian dan tunjangan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PPPK berhak menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan. Untuk beban anggaran gaji PPPK dibebankan pada anggaran APBN/APBD sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang 5 tahun 2014.

### 2.6 Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer

Terbitnya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 yang memunculkan istilah tenaga honorer, memuat masyarakat menjadi berminat untuk bekerja sebagai tenaga honorer, adapun pengertian tenaga honorer terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005. Tenaga honorer adalah seorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penerbitan peraturan pemerintah tersebut didasarkan pada alasan untuk mengutamakan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Hal ini dilanjutkan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 perubahan pertama dari peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 dan perubahan kedua dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012.

Terbitnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer yang merupakan perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tersebut mengatur 3 (tiga) hal yaitu, mengenai honorer kategori I, honorer kategori II, dan jabatan mendesak untuk diangkat

menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum dalam pengangkatan tenaga honorer kategori I atau yang disebut dengan honorer tertinggal atau tercecer secara adil dan transparan. Selain itu terbitnya peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 ini bisa mengakhiri rezim honorer sehingga manajemen pegawai negeri sipil (PNS) dapat ditata sesuai dengan prinsip-prinsip merit sistem dan tidak dijadikan komoditi politik ajang KKN yang mengakibatkan rendahnya kualitas birokrasi tanah air.

Setelah munculnya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara membuat kedudukan tenaga honorer menjadi tidak jelas. Kedudukan tenaga honorer menjadi tidak jelas karena istilah tenaga honorer diganti menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan demikian secara tidak langsung kedudukan tenaga honorer menjadi hilang dan diganti oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika diperhatikan, kedudukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja hampir sama. Namun tenaga honorer tidak bisa secara otomatis diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berbeda dengan tenaga honorer, karena pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki kontrak perjanjian kerja yang jelas. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak dapat secara otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil. Sebaliknya, tenaga honorer dapat diangkat secara otomatis menjadi calon pegawai negeri sipil setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008. Pengangkatan ini dapat dilakukan jika yang bersangkutan masa kerja minimal satu tahun. Kebijakan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



profesionalisme di dalam tubuh kepegawaian Indonesia. Tenaga honorer yang berminat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus memenuhi syarat administratif wajib mengikuti seleksi oleh pemerintah.

Dalam menghadapi masalah hukum tersebut, maka diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas-asas prevensi, yaitu:

1. *Lex Superior Derogate legi inferiori*, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya mengenyampingkan berlakunya peraturan yang tingkatannya dibawah.
2. *Lex specialis derogate legi generali*, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih umum.
3. *Lex posteriori derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama.

Dengan masih banyaknya pemerintah daerah yang mengangkat tenaga honorer, meskipun dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 pemerintah tidak boleh mengangkat tenaga honorer, secara tidak langsung. Dalam negara hukum setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Asas ini menentukan tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang sebelumnya yang memberikan jalan bagi tenaga honorer untuk otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil apabila telah cukup lama mengabdikan diri di sebuah instansi pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka harus mengikuti seleksi layaknya pelamar umum. Di lain sisi, tenaga honorer dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil jika telah mengabdikan 1 tahun masa bekerja.

Penerapan kebijakan terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus menunggu adanya sebuah peraturan pemerintah dan peraturan presiden, sesuai dengan pasal 94 ayat 1 undang-undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Namun sampai saat ini, peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang terkait dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja belum ada, sehingga nasib para tenaga honorer menjadi semakin tidak jelas. Di satu sisi pemerintah belum bisa menerapkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tanpa adanya sebuah aturan presiden dan di sisi lain pemerintah harus menghapuskan keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Jurnal made aditya pramana putra (2016;620-624).

#### 2.7 Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Islam

Aparatur sipil negara dalam Islam diistilahkan dengan *tabi'in* (pengikut). Dimana *tabi'in* diwajibkan untuk patuh dan taat terhadap perintah dan peraturan yang dibuat oleh *ulil amri* (pemerintah). Istilah pegawai pemerintah di dalam

Islam tidak terlepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika memimpin pemerintahan. Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dewan penasehat (*mustasyar*), sekretaris (*katib*) staf khusus, ajudan, (rasul), juru bicara, staf ahli (*syu'ra dan kutaba*), gubernur, kepala daerah, dan jabatan umum (*wali*), manajer lokal atau pejabat sipil (*ru'sa*), pengawas (*nakib*), hakim dan jakasa (*qudat*), dan pejabat serta petugas pasar dan keuangan (*sahib al-suq*). Setiap lembaga negara yang bertugas mengurus rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan diawasi oleh badan pengawas khusus yang tergabung dalam majlis *nuqaba*. Struktur kekuasaan juga dibagi dalam perwakilan, dalam situasi mendesak dan darurat, Nabi akan melantik pejabat khusus tentunya setelah melalui musyawarah dengan dewan nasehat.

Negara Madinah juga membentuk “departemen” yang membidangi administrasi pemerintah (*diwanal-Insyah*), yang bertugas dalam penulisan dokumen politik, wahyu, undang-undang keselamatan, dokumen negara, perjanjian, pengutusan wakil keamanan, pelaksanaan institusi diplomatik (*sifarah*), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian.

Sedangkan dalam Islam seorang pegawai yang netral itu harus yang amanah, ia harus berlaku adil, tidak memihak dan berbuat curang. Masalah keadilan Allah SWT. Tegaskan di dalam al-qur'an yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  
وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa: 135).

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Lukman Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018	Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Bacitro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta)	Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja pegawai dikelurahan baciro kecamatan gondokusuman yogyakarta yaitu melakukan sosialisasi untuk memberikan penyegaran tentang peraturan- peraturan yang berkaitan dengan disiplin pegawai negeri sipil diantaranya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai	Penelitian yang dilakukan oleh lukman membahas tentang Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Bacitro Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta). Sedangkan peneliti yang dilakukan oleh peneliti adalah Analisis dampak pemberlakuan dampak pemberlakuan undang-undang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		negeri sipil. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bitek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan dengan PNS.	nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis. Selain itu peneliti melakukan penelitian di tempat yang berbeda pula.
Muzdalifah Fattah Universitas Tadulako 2016	Implikasi Hukum Atas Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Implikasi atas pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap pegawai negeri sipil berkinerja tinggi adalah pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon rekrutmen pengangkatan penempatan dan promosi jabatan yang	Adapun yang menjadi perbedaan antara lain, penelitian yang dilakukan oleh muzdalifah fattah membahas tentang Implikasi Hukum Atas Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sedangkan penelitian adalah Analisis dampak pemberlakuan dampak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis.

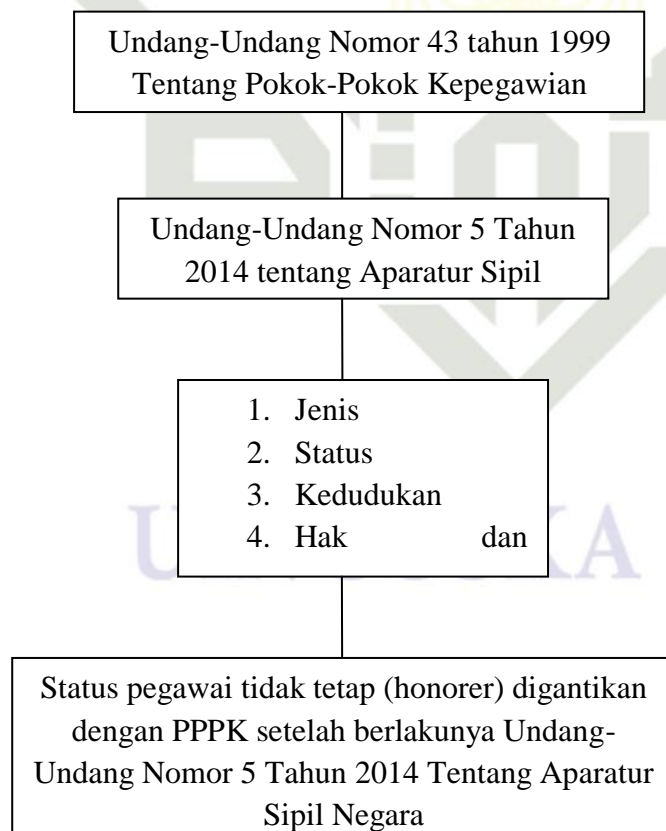
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
		dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.	

### Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam sugiono (2007) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur satuan variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis, adapun konsep operasional dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Konsep Operasional**

Konsep	Indikator
Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer	Jenis
	Status
	Kedudukan
	Hak dan Kewajiban
	Upaya pemerintah atas berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 terhadap tenaga honorer

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam waktu mulai dari bulan Februari 2020 sampai selesai dan lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moelong (2007) mendefenisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu penelitian deskriptif dijelaskan oleh Zuriah (2009) sebagai penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

#### 3.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penelitian dan sumber pertama atau aslinya atau dengan kata lain perolehan data melalui kegiatan menulis secara langsung ke lokasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu adalah data-data dimana peneliti memperoleh informasi, keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak terkait.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperoleh sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik dokumentasi untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara.

#### 3. Observasi

Observasi digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Penelitian mengadakan pengamatan secara langsung pada subjek penelitian yang berhubungan dengan dampak pemberlakuan



undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara terhadap tenaga honorer pada pemerintah sekretariat daerah kabupaten bengkalis.

### Informen Penelitian

Informen penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti :

**Tabel. 3.1 Informen Penelitian**

No	Nama informen	Jabatan	Alasan dipilih
1.	Safrizal, S.AP	Kasubag pengembangan kinerja organisasi dan kepegawaian	Karena yang bersangkutan sebagai Kasubag pengembangan kinerja organisasi dan kepegawaian di Sekretariat Daerah
2.	Nurzana, SE	Pegawai atau staff bagian organisasi	Karena yang bersangkutan sebagai pegawai atau staff bagian organisasi
3.	Djamaludin, AP, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian	Karena yang bersangkutan sebagai Kepala Badan Kepegawaian di Kabupaten Bengkalis
4.	Evi	Honorer	Karena yang bersangkutan sebagai honorer
5.	Nelly Dawati	Honorer	Karena yang bersangkutan sebagai honorer
6.	Ardila Cintia	Honorer	Karena yang bersangkutan sebagai honorer

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (2009:147) yaitu:

#### 1. Reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.

#### 2. Penyajian data

Setelah reduksi data langkah selanjutnya dalam analisis data model ini adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (2009:147) sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

#### 3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi data dan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan, pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kepulauan Bengkalis merupakan kabupaten dengan julukan negeri junjungan atau kota terubuk. Banyak ragam budaya dan masyarakatnya pun tergolong dan terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, minang dengan mayoritas penduduknya adalah Melayu. Asal mula terbentuknya nama Bengkalis berawal dari kedatangan Tuan Bujang alis Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah beserta pembantu dan pengikutnya pada tahun 1722 di kepulauan Bengkalis. Diambil dari kata “Mengkal” yang artinya sedih atau sebak dan “Kalis” yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian. Raja Kecil mengungkapkan kepada pembantu dan mengikutinya “Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah Negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini” ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. Sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang mengkal tapi masih kalis, akhirnya ucapan ini menjadi perkataan “oh baginda sedang Mengkalis”. Dari sinilah timbul perkataan Mengkalis dan lama kelamaan perkataan ini berubah menjadi “Bengkalis”.

Pada mulanya Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1956 lembaran negara nomor 25 tahun 1956 dengan ibukotanya Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi lagi pemekaran, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis,



Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Dan pada awal 2009 Kabupaten Bengkalis kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, memiliki luas area sebesar 6.975,41 km<sup>2</sup>. Secara geografis, posisi wilayah dari Kabupaten Bengkalis terletak pada 2°30'-0°17' Lintang Utara dan 100°52'-102°10' Bujur Timur. Ibu Kota Kabupaten Bengkalis adalah Pulau Bengkalis yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Sumatra. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terhitung sebanyak 537.142 jiwa dengan sebaran penduduk 77 jiwa/km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa dengan satu buah kota yang cukup besar, yakni Kota Duri di Kecamatan Mandau. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis ditetapkan perangkat Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah dan 12 (dua belas) bagian serta 36 (tiga puluh enam) sub bagian. Sekretariat Daerah, tipe A; merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

#### 4.2 Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis

1. Terwujudnya pemerintah yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

### 4.3 Profil Kepegawaian

Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

#### 4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang manajemen kepegawaian.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah.
4. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 4.4 Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Proses penyusunan rencana strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis diamali dengan penetapan Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan kemudian di jabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya dengan memperhatikan faktor-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor internal dan eksternal, serta pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang di identifikasikan melalui analisa SWOT (*Setrenght, Weaknnesses, Opportunites and Threats*).

1. Pernyataan Visi

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis adalah : **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Govermen)”**.

2. Pernyataan Misi

Guna mendukung visi Kabupaten Bengkalis, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau oleh masyarakat luas.
- b. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efesien.

#### 4.5 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Berdasarkan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
    - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan dan Perbatasan
    - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Binamental Spritual
  - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
  - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Perundang-undang
  - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum
  - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
- d. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri
  - 2) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri
  - 3) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
  - a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
    - 2) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
    - 2) Sub Bagian Pengadilan Program
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang atau Jasa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sub Bagian Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik
- 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang atau Jasa
- d. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
  - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup
  - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air
4. Asisten Administrasi Umum, Membawahi :
  - a. Bagian Umum, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Staf Ahli
    - 2) Sub Bagian Perlengkapan
    - 3) Sub Bagian Rumah Tangga
  - b. Bagian Organisasi , terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
    - 3) Sub Bagian Kinerja, Reformasi, Birokrasi, dan Kepegawaian Setda
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Protokol
    - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan
    - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

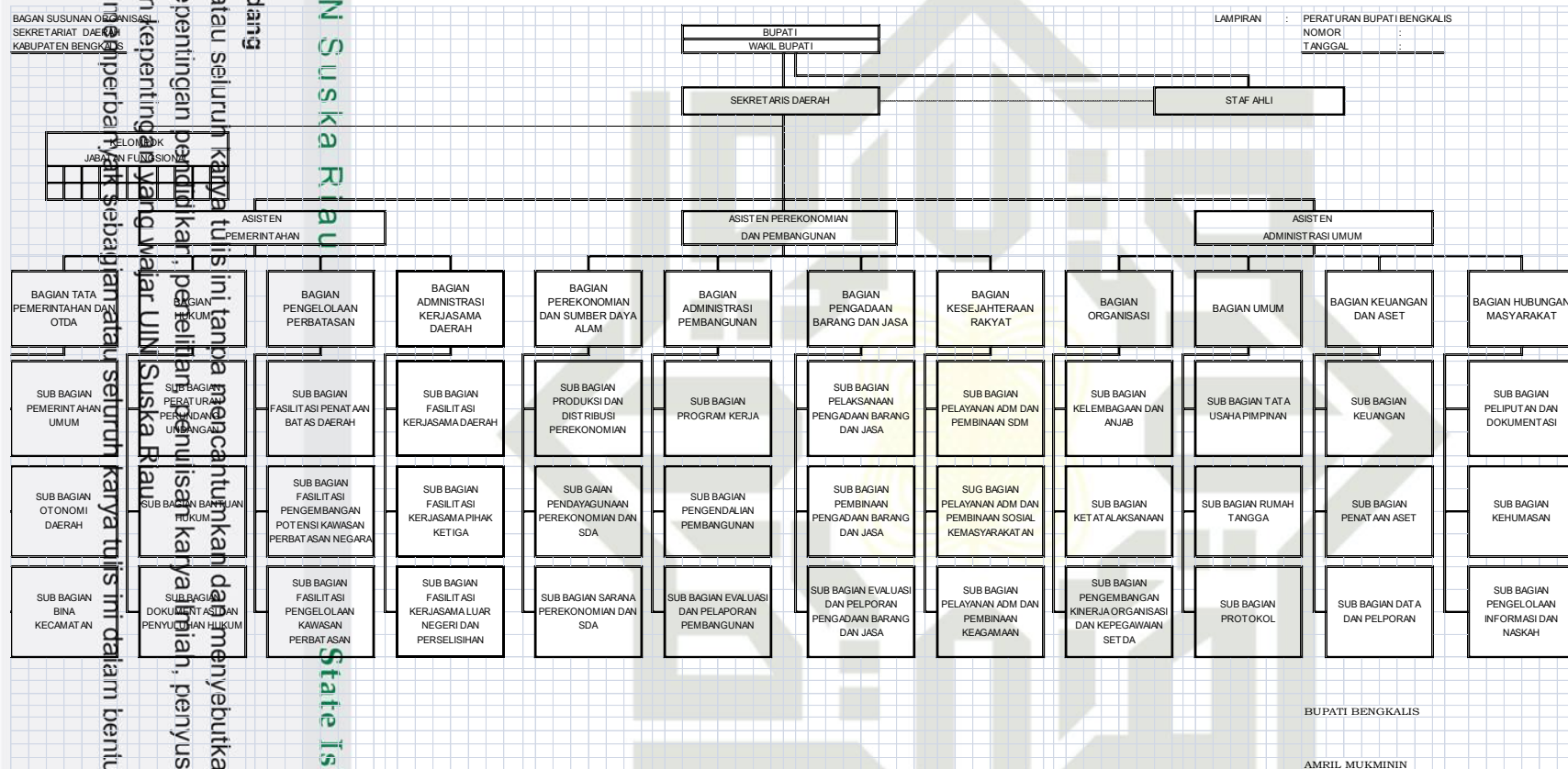
d. Bagian Perencanaan dan Keuangan , terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Pelaporan

Dalam menjabarkan tugas dan fungsinya serta bagaimana fungsi-fungsi organisasi yang dijalankan, dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Bagian Sekretariat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :







Sumber: Sekretaris Daerah kabupaten Bengkalis

## 4.6 Jenis Populasi Setiap Bidang

Tabel. 4.1. Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kepala Sekretaris Daerah	1	1
2.	Asisten Pemerintah	1	1
3.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	1	1
4.	Asisten Administrasi	1	1
5.	Kabag Tata Pemerintah Dan Otonomi Daerah	1	1
6.	Kasubag Pemerintahan Umum	1	1
7.	Kasubag Otonomi Daerah	1	1
8.	Kasubag Bina Kecamatan	1	1
9.	Kabag Hukum	1	1
10.	Kasubag Peraturan Perundang-Undangan	1	1
11.	Kasubag Bantuan Hukum	1	1
12.	Kasubag Dokumentasi Dan Penyuluhan Hukum	1	1
13.	Kabag Pengelolaan Perbatasan	1	1
14.	Kasubag Fasilitas Penataan Batas Daerah	1	1
15.	Kasubag Fasilitas Pengembangan Potensi Kawasan Perbatasan Negara	1	1
16.	Kasubag Fas. Peng. Kawasan Perbatasan	1	1
17.	Kabag Administrasi Kerjasama Daerah	1	1
18.	Kasubag Fasilitas Kerjasama Daerah	1	1
19.	Kasubag Fasilitas Kerjasama Pihak Ketiga	1	1
20.	Kasubag Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri Dan Perselisihan	1	1
21.	Kabag Perekonomian Dan Suber Daya Alam	1	1
22.	Kasubag Produksi & Distribusi Perekonomian	1	1
23.	Kasubag Pendayagunaan Perekonomian & SDA	1	1
24.	Kasubag Sarana Perekonomian & SDA	1	1
25.	Kabag Administrasi Pembangunan	1	1
26.	Kasubag Program Kerja	1	1
27.	Kasubag Pengendalian Pembangunan	1	1
28.	Kasubag EV Dan Pelaporan Pembangunan	1	1
29.	Kabag Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1
30.	Kasubag Pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Barang Dan Jasa	1	1
31.	Kasubag Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1
32.	Kasubag Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	1	1
33.	Kabag Kesejahteraan Rakyat	1	1
34.	Kasubag Pelayanan ADM Dan Pembinaan SDM	1	1
35.	Kasubag Pelayanan ADM Pemsos Kemasyarakatan	1	1
36.	Kasubag Pelayanan ADM Dan Pembinaan	1	1

### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
	Keagamaan		
37.	Kabag Organisasi	1	1
38.	Kasubag Kelembagaan Dan Ranjab	1	1
39.	Kasubag Ketatalaksanaan	1	1
40.	Kasubag Pengembangan Kinerja Organisasi & Kepegawaian Setda	1	1
41.	Kabag Umum	1	1
42.	Kasubag Tata Usaha Pimpinan	1	1
43.	Kasubag Rumah Tangga	1	1
44.	Kasubag Protokol	1	1
45.	Kabag Keuangan Dan Aset	1	1
46.	Kasubag Keuangan	1	1
47.	Kasubag Penataan Aset	1	1
48.	Kasubag Data Dan Pelaporan	1	1
49.	Kabag Humas	1	1
50.	Kasubag Peliputan Dan Dokumentasi	1	1
51.	Kasubag Kehumasan	1	1
52.	Kasubag Pengelolaan Informasi Dan Naskah	1	1
53.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	128	128
54.	Tenaga Honorer	230	230
	<b>JUMLAH</b>	<b>410</b>	<b>410</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

#### 4.7 Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis

Perangkat Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah. Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.

Kabupaten Bengkalis memiliki 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mana meraka yang menjalankan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkalis.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.2 : Jumlah PNS dan Honorer Pada Satuan Perangkat Daerah**

No	Nama Satuan Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Honorer
1.	Sekretariat Daerah	180	230
2.	Sekretariat DPRD	60	125
3.	Inspektorat	43	14
4.	Dinas Pendidikan	3.740	1369
5.	Dinas Kesehatan	678	179
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95	77
7.	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	64	211
8.	Dinas Pemadam Kebakaran	40	211
9.	Dinas Sosial	55	79
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41	-
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43	27
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38	41
13.	Dinas Ketahanan Pangan	35	27
14.	Dinas Lingkungan Hidup	72	825
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	58	58
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37	41
17.	Dinas Perhubungan	103	219
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35	10
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	45	19
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	69	24
21.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	66	183
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	53	68
23.	Dinas Pertanian	121	46
24.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	70	201
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	59	62
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	86	233
27.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Daerah	61	17
28.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74	84
29.	Badan Pendapatan Daerah	106	79
30.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan	52	47

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Satuan Perangkat Daerah	Jumlah PNS	Jumlah Honorrer
	Pelatihan		
31.	Badan Penelitian dan Pengembangan	27	56
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32	46
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31	16
34.	Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis	237	248
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	181	-
36.	Kecamatan Bengkalis	63	43
37.	Kecamatan Bantan	27	22
38.	Kecamatan Bukit Batu	39	27
39.	Kecamatan Siak Kecil	31	22
40.	Kecamatan Rupat	44	52
41.	Kecamatan Rupat Utara	30	20
42.	Kecamatan Mandau	98	72
43.	Kecamatan Pinggir	31	35
44.	Kecamatan Bandar Laksmana	11	19
45.	Kecamatan Talang Mandau	14	16
46.	Kecamatan Bathin Solapan	16	16
Jumlah Total		7.211	5.437

Sumber: Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Kesimpulan

##### 6.1.1 Upaya atau Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Menata Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer Dan Sejenisnya Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis senantiasa menata administrasi kepegawaian tenaga honorer dan sejenisnya melalui terbentuknya legalitas formalnya seperti diterbitkannya surat keputusan (SK) tenaga honorer yang awalnya dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat Daerah, untuk tahun 2019 seterusnya surat keputusan (SK) sudah dialihkan kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baik itu Kepala Badan dan Kepala Dinas dilingkungan instansi pemerintah kabupaten bengkalis dan ditugaskan atau ditempatkan sesuai dengan surat keputusan (SK) masing-masing bagian.

Adapun surat keputusan (SK) ini berlaku selama 1 tahun kemudian surat keputusan (SK) tersebut diperpanjang oleh pemerintah kabupaten bengkalis selama pemerintah masih membutuhkan tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan anggaran yang tersedia oleh APBD Kabupaten Bengkalis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 6.1.2 Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Administrasi Kepegawaian Tenaga Honorer Dan Sejenisnya Pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan roda pemerintahan (kinerja) masih membutuhkan tenaga honorer yang pengangkatannya melalui kepala perangkat daerah masing-masing dan penggajiannya diatur melalui sumber anggaran dimasing-masing instansi pemerintahan sesuai dengan anggaran APBD yang tersedia di Kabupaten Bengkalis.

Disamping itu juga Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih terdapat kekurangan pegawai seperti tenaga operator, keamanan dan kebersihan yang sifatnya untuk membantu kelancaran perencanaan pekerjaan.

### 6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai bentuk masukan penulis agar kedepannya Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis menjadi instansi yang lebih baik lagi kedepannya.

1. Disarankan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk lebih memberikan semangat kinerja bagi tenaga honorer yang ada dilingkungan instansi pemerintahan dan sekaligus dapat memberikan motivasi di harapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis kiranya dapat

memberikan jaminan untuk dapat mengangkat setatus dan kedudukannya sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara atau sekiranya menjadi sekala prioritas untuk tingkat kelulusan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

2. Disarankan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat meningkatkan motivasi dan inovasi sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak diharapkan agar kiranya pemerintah juga dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM), melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan dan kursus lainnya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kinerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Disarankan bahwa Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis agar kiranya membuat regulasi (aturan) serta fakta integritas terhadap pegawai honorer tentang disiplin kinerja maupun hak dan tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku**

- Abdillah afandi. 2019. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung [skripsi]. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Al Kadafi, Muammar dan Rusdi. 2018. *Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*, Pekanbaru, Kreasi Edukasi.
- Anggara,Sahya. 2016, *Administrasi Kepegawaian Negara*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Hartini,Sri dan Sudrajat, 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*,Jakarta, Sinar Grafika.
- Suharti,Eni. 2016. *UNDANG-UNDANG APARATU SIPIL NEGARA (UU RI NO.5 TAHUN 2014)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Thoha, Miftah. 1987. *Administrasi Kepegawian Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

**b. Jurnal**

- Saputro Dicky Agus, sudirsono, Lutfi Effendi. *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Jati ,Wisisto Raharjo. *Analisis Status, Kedudukan, Dan Pekerjaan Pegawai Tidak Tetap Dalam Uu No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Borneo Administator/Volume 11/No.1/2015, Pusat penelitian politik, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia.
- Aldila, Putri dan Suardita, Kutut I. *Kebijakan Pemerintah Dalam Kejelasan Status Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Putra, Made Aditya Pramana. 2016. *perlindungan hukum tenaga honorer setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara*,Jurnal Magister Udayana, September, hal 620-624

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Peraturan Undang-Undang

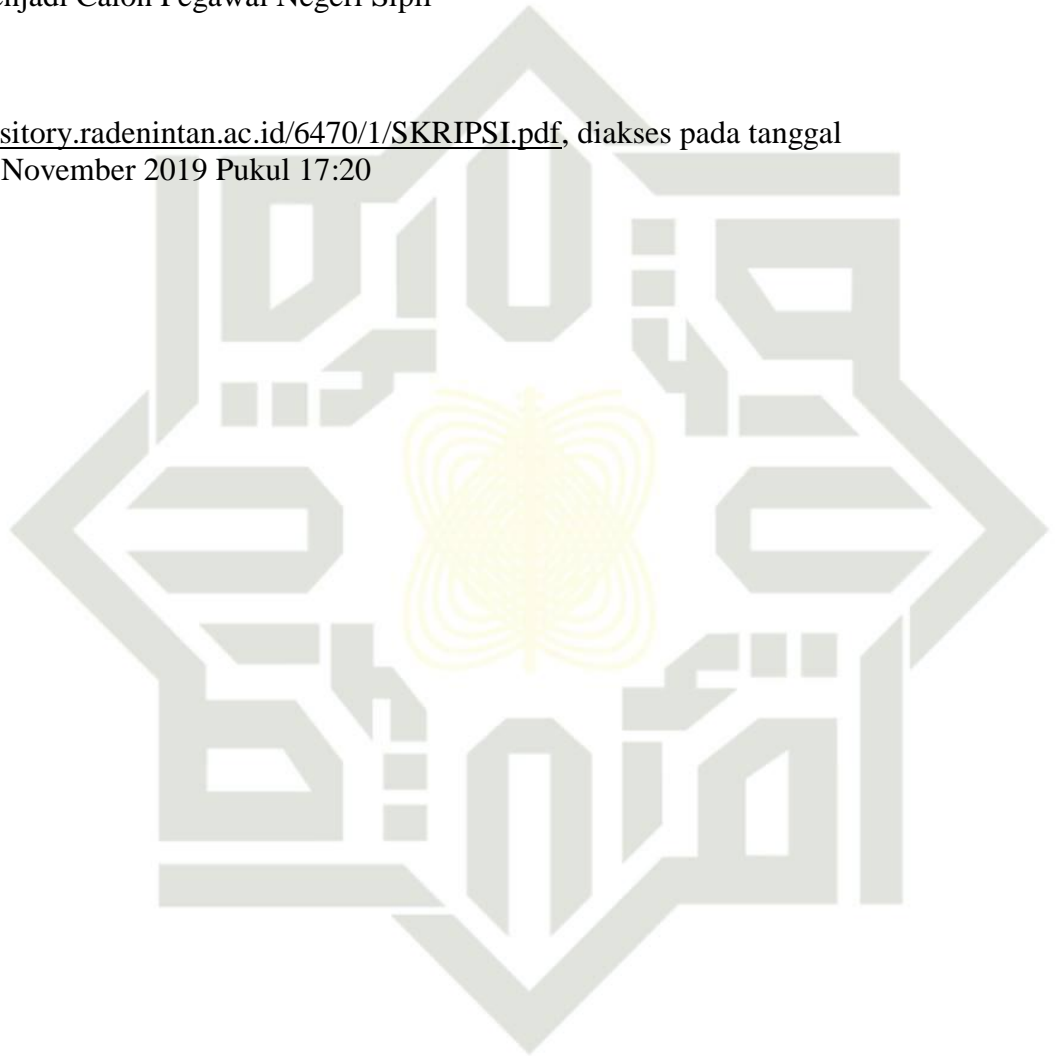
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2005 Pengangkatan Tenaga Honorer  
Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

#### Website

<http://repository.radenintan.ac.id/6470/1/SKRIPSI.pdf>, diakses pada tanggal  
20 November 2019 Pukul 17:20



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN : A

### DAFTAR GAMBAR



Gambar : 1 Penulis bersama Bapak Djamaludin selaku kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Bengkalis, pada waktu pengumpulan data lapangan.



Gambar : 2 Penulis bersama Bapak Safrizal, S.Ap selaku KASUBAG Pengembangan Kinerja Organisasi dan Kepegawaian SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian.



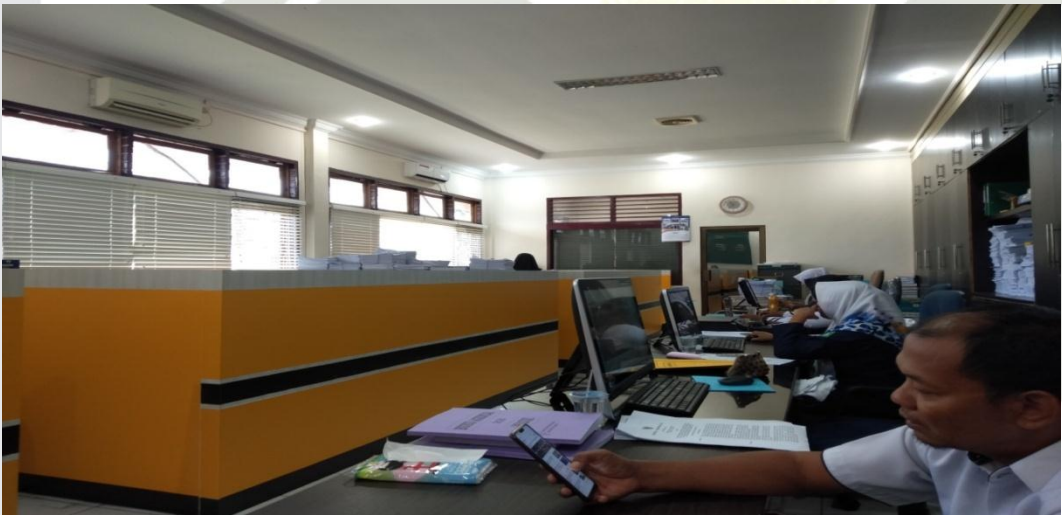
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha



Gambar : 3 Penulis bersama Ibuk Nurzana selaku Staff pada Bagian Organisasi SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian.



Gambar : 4 Salah satu kegiatan pegawai ASN dan tenaga honorer pada ruangan Organisasi SETDA yang sedang melaksanakan tugas dan kewajiban.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : 5 Salah satu lorong pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, terlihat bersih dan rapi.



Gambar : 6 Situasi halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis terlihat bersih.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha



Gambar : 7 Situasi parkir mobil dinas pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertib dan teratur dengan baik.



Gambar : 8 Situasi parkir kendaraan roda dua pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang tertib dan teratur dengan baik.

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : 9 Ruang lingkup Kantor Sekretariat Daerah masih di lingkungan Kantor Bupati Bengkalis, pada waktu pengumpulan data lapangan.



Gambar : 10 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis, pada waktu pengumpulan data.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Ha



Gambar : 11 Penulis bersama Ibuk Evi selaku Honorer pada Bagian Organisasi SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian.



Gambar : 12 Penulis bersama Ibuk Nelly Dawati selaku Honorer pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar : 13 Penulis bersama Ibuk Ardilla Cintia selaku Honor pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA, pada waktu pengumpulan data dan informasi penelitian.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

---

Nomor	: Un.04/F.VII/PP.00.9/696/2020	Pekanbaru, 30 Januari 2020 M
Sifat	: Biasa	4 Jumadil Akhir 1441 H
Lampiran	: -	
Perihal	: <u>Bimbingan Skripsi</u>	

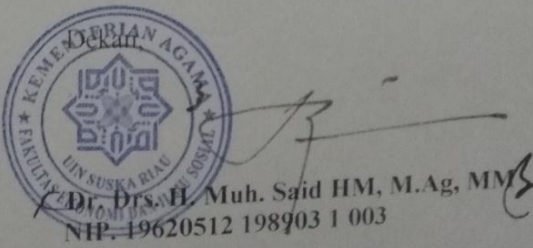
Kepada  
 Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,  
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a	: M. RIDHO ZULFAHMI
NIM	: 11675101140
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis"**. Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

  
**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampai - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/881/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 7 Februari 2020 M  
12 Jumadil Akhir 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : M. Ridho Zulfahmi  
NIM. : 11675101140  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
**"Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003



© Ha


Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/30696  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

  
 1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/881/2020** Tanggal 7 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: M. RIDHO ZULFAHMI
2. NIM / KTP	: 11675101140
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS DAMPAK PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP TENAGA HONORER PADA PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
7. Lokasi Penelitian	: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

arif Kasim Ria






Hak Cipta

© Ha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No.      Bengkalis Kode Pos : 28751

Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : .....Website : [www.bengkalis.go.id](http://www.bengkalis.go.id)

---

Nomor : 061/DPMPPTSP-JU/II/2020/132

Lampiran : -

Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 17 Februari 2020

Kepada :

Yth. Kepala Bagian Umum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bengkalis

di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/30696 tanggal 10 Februari 2020 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	: M. RIDHO ZULFAHMI
Alamat	: JL. Kartini, Selatbaru
NIM	: 11675101140
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Jenjang	: S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :  
"Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupate Bengkalis".
2. Lokasi Penelitian :  
KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.


Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 17 Februari 2020

a.n. BUPATI BENGKALIS



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD, AP., M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Yang Bersangkutan.

Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E

if Kasim Ria





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkalis Kode Pos : 28712  
Telp. (0766) 21258 Fax (0766) 21687 E-mail :  
Website : www.bengkalis.go.id

### SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 060/ORG/2020/198

Yang bertanda tangan dibawah ini Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis :

Nama	: Drs. H. T. ZAINUDDIN, M.Si
NIP	: 19620615 198801 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan	: Asisten Administrasi Umum
Satuan Kerja	: Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Dengan ini menerangkan :

Nama	: M. RIDHO ZULFAHMI
NIM	: 11675101140
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara

Bahwa benar mahasiswa tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



Drs. H. T. ZAINUDDIN, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620615 198801 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP**

**M. Ridho Zulfahmi**, dilahirkan di Kota Bengkalis pada tanggal 26 September 1997. Anak dari Bapak H. Mahmud dan Ibu Hj. Siti Marso'ah. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SD Negeri 16 Bantan dan lulus tahun 2010, melanjutkan sekolah ke SMP Al-amin

Bengkalis lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Bantan dan lulus pada tahun 2016. Setelah menempuh pendidikan 12 tahun, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara S-1. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Resam Lapis Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penulis mengikuti ujian munaqasyah pada tanggal 20 Juli 2020 dengan judul skripsi "***Analisis Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Tenaga Honorer Pada Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis***" dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).